

# KAJIAN FISKAL REGIONAL Triwulan III 2020





# Dashboard

# Kajian Fiskal Regional Provinsi Gorontalo

"Musuh utama masyarakat justru bukan virus corona itu sendiri, melainkan rasa takut dan cemas yang berlebihan."

~ Joko Widodo ~



### Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

#### PDRB ADHB dan PDRB ADHK Provinsi Gorontalo



Pertumbuhan ekonomi Gorontalo triwulan III 2020 terkontraksi minus 0,07 persen (yoy), namun tumbuh 2,98 persen (q to q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh industri pengolahan sebesar 8,30 persen. Dari sisi pengeluaran dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) sebesar 5,55 persen.



#### Inflasi Prov. Gorontalo



Pada triwulan III 2020, Provinsi Gorontalo sempat penurunan tingkat inflasi, bahkan pada bulan september sempat mengalami minus.



#### Gini Rasio Prov. Gorontalo



Provinsi Gioroniais yang tikikir oleh Giril Ratio adalah sebesat 1,400 Jika dimira menanti wlayah, di daerah perkataan angkan lericatati sebesar 16,67 persen, sedangkan perdesaan tenatah angka yang lebih rendah, yahi sebesar 16,09 persen. Artimya, pengelukean penduduk baik di daerah perkataan maupun perdesaan di Provinsi Giorontalo berada dalam kalegori kalimpangan sedang.

#### Tingkat Pengangguran Terbuka Prov. Gorontalo

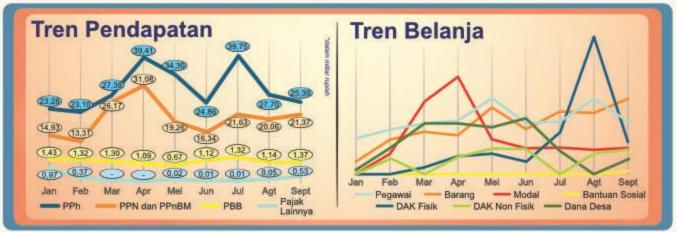


miskinan
srs usmur, trigikal kemiskinan di Provinsi Gorontolo
srs usmur, trigikal kemiskinan di Provinsi Gorontolo
dia 2015 – 2020 mengalami perinuturan baik dari skil
shi mingum persantisosinya, kacuali pada Maret 2017 yang
pati naki tapa dari Septamber 2016. Persumumat trigikal
skinian paling siginfikan toripali pada September 2018.
ii sebesari 0.98 polin dibanfikipam Maret 2018.



Dari sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Gorontalo periode Agustus 2020 naik menjadi 4,28 persen setelah sebelumnya pada periode Agustus 2019 berada pada level 3,76 persen, Angka ini jauh lebih baik dari rata-rata nasional sebesar 7,07 persen.

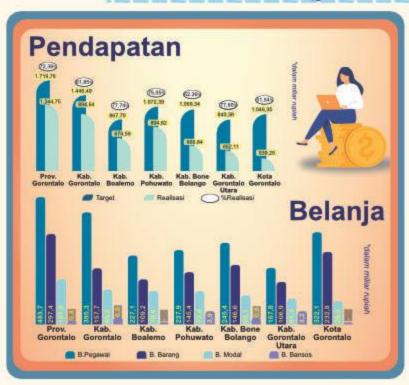
# Perkembangan Kinerja APBN



Sampai dengan triwulan III 2020 baik dari sisi Pendapatan maupun Belanja APBN telah mengalami pemulihan. Diterapkannya protokol kesehatan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan perekonomian, sehingga mulai terlihat pemulihan kegiatan perekonomian pada Triwulan III 2020



# Perkembangan Kinerja APBD



Sampai dengan triwulan III 2020, realisasi APBD di sisi pendapatan mencapai 67,93 persen, terkontraksi 7,98 persen (yoy).Sementara di sisi belanja sebesar 52,84 persen, terkontraksi minus 6,59 persen (yoy). Kinerja realisasi APBD Gorontalo dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 serta dampak ekonomi yang ditimbulkan.







# Daftar Isi

BAB I	
Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional	1
1.1. Produk Domestik Regional Bruto	1
1.2. Inflasi	2
1.3. Indikator Kesejahteraan	3
BAB II	
Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN	5
2.1 Pendapatan Negara	6
2.2 Belanja Negara	7
2.3 Manajemen Investasi Pusat	8
2.4 Prognosis Realisasi APBN	9
BAB III	
Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD	10
3.1 Pendapatan Daerah	10
3.2 Belanja Daerah	13
3.3 Prognosis Realisasi APBD	14
BAB IV	
Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran	
Konsolidasian	15
4.1 Pendapatan Konsolidasian	15
4.2 Belanja Konsolidasian	17
4.3 Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB Gorontalo	19
BAB V	20
Berita Fiskal Terpilih	20



# Daftar Grafik

Grafik 1.1	PDRB Gorontalo	1
Grafik 1.2	Distribusi PDRB Sisi Produksi	1
Grafik 1.3	Distribusi PDRB Sisi Pengeluaran	1
Grafik 1.4	Inflasi Bulanan (m to m) 2020	2
Grafik 1.5	Inflasi Tahunan (yoy) 2020	2
Grafik 1.6	Tren Presentase Penduduk Miskin di Gorontalo	3
Grafik 1.7	Gini Rasio di Gorontalo	3
Grafik 1.8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4
Grafik 1.9	Indeks Pembangunan Manusia	4
Grafik 2.1	Tren Penerimaan Perpajakan	6
Grafik 2.2	Realisasi Bea Masukan dan Bea Keluaran	6
Grafik 2.3	Realisasi PNBP dan BLU per Kabupaten Kota	7
Grafik 2.4	Tren per Jenis Belanja	7
Grafik 2.5	Tren Jumlah Debitur KUR berdasar Skema Pembiayaan	8
Grafik 2.6	Hasil Winter's Method Plot untuk Realisasi Penerimaan dan Belanja APBN	9
Grafik 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan III 2020	11
Grafik 3.2	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III 2020	11
Grafik 3.3	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	12
Grafik 3.4	Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12
Grafik 3.5	Realisasi Penerimaan Target Komponen Lain-lain PAD yang Sah	12
Grafik 3.6	Komposisi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	13
Grafik 3.7	Realisasi Jenis Belanja Triwulan III 2020	13
Grafik 3.8	Pagu dan Realisasi per Urusan	14
Grafik 3.9	Hasil Winter's Method Plot untuk Realisasi Penerimaan dan Belanja APBD	14
Grafik 4.1	Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Gorontalo	15
Grafik 4.2	Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Konsolidasian Triwulan III 2020	16
Grafik 4.3	Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Konsolidasian Triwulan III 2020	17

Grafik 4.4	Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian	17
Grafik 4.5	Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Gorontalo Triwulan III Tahun 2019-2020	18
Grafik 5.1	Kasus Positif Covid-19 Berdasarkan Kelompok Usia	20
Grafik 5.2	Perbandingan Ekonomi Gorontalo dan Nasional Tahun 2019-2020	21
Grafik 5.3	Perbandingan Sektor Pembentuk PDRB Triwulan II dan III 2020	22
Grafik 5.4	PKP Nasional dan PKP Gorontalo	22
Grafik 5.5	Perbandingan Presentase Realisasi APBN dan APBD Gorontalo Triwulan III 2020	23
	Daftar Tabel	
Tabel 2.1	Realisasi Triwulan III APBN Prov.Gorontalo	5
Tabel 2.2	Realisasi Per Jenis Belanja	7
Tabel 2.3	Pagu dan Realisasi BLU sampai dengan Triwulan III 2020	8
Tabel 2.4	Perkiraan Realisasi APBN sampai dengan Triwulan IV 2020	9
Tabel 3.1	Profil APBD Tingkat Provinsi Triwulan III tahun 2019-2020	10
Tabel 3.2	Perkiraan Realisasi APBD s.d. Triwulan IV 2020	14
Tabel 4.1	Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Gorontalo	
	Triwulan III Tahun 2020	15
Tabel 4.2	Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi Gorontalo Triwulan III 2019-2020	17
Tabel 4.3	Ringkasan Laporan Operasional Provinsi Gorontalo	19
Tabel 4.4	Realisasi Pendapatan Konsolidasian di Wilayah Provinsi Gorontalo Triwulan III 2019-2020	19

# BAB I Perkembangan dan Analisis **Ekonomi Regional**

Pada bab ini di jabarkan kondisi Ekonomi Regional di Provinsi Gorontalo

#### 1.1. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB ADHB pada triwulan III tahun 2020 mencapai Rp10,55 triliun sedangkan PDRB ADHK mencapai Rp7,18 triliun. Secara umum, perekonomian Gorontalo pada triwulan III tahun 2020 lebih baik dari triwulan sebelumnya, Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 2,98 persen (q to q). Namun untuk pertumbuhan tahunan, efek Covid-19 masih terasa pengaruhnya. Gorontalo mengalami kontraksi sebesar -0,07 persen (yoy). Hal ini masih senada dengan perlambatan ekonomi pada skala nasional yang terkontraksi sebesar -3,49 persen, walaupun Gorontalo jauh lebih baik dari rata-rata nasional.



Q2-2020

Q1-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo

PDRB ADHB Gorontalo

Q4-2019

(9,09 persen), selain itu tumbuh negatif.

Q3-2019

04-2019 5 Q3-2020 Pertumbuhan Gorontalo (yoy) Pertumbuhan Nasional (yoy) PDRB ADHK Gorontalo Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tahunan (yoy) yang mengalami kontraksi -0,07 persen, pertumbuhan hanya terjadi di sebagian lapangan usaha, yaitu Jasa Keuangan (14,21 persen), Pengadaan Listrik dan Gas (9,43 persen) serta Informasi dan Komunikasi

(4,05)

(2,97)

Sementara jika dilihat dari struktur PDRB (ADHB), penyumbang kontribusi terbesar masih didominasi oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 39,36 persen (Rp4,15 triliun). Selain itu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,87 persen) serta Konstruksi (10,50 persen).





Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan penyumbang pertumbuhan negatif tertinggi, yaitu sebesar -0,68 persen. Diikuti Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (-0,26 persen) serta Transportasi dan Pergudangan (-0,23 persen).

Berbeda dengan pertumbuhan tahunan, ekonomi triwulanan (q to q) menunjukkan hal yang cukup menggembirakan, karena berhasil tumbuh 2,98 persen. Hal ini diduga karena keberhasilan Gorontalo dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh Industri Pengolahan (8,30 persen), yang merupakan hasil dari pertumbuhan industri kelapa di Gorontalo. Selanjutnya diikuti oleh Jasa Keuangan dan Asuransi (5,89 persen) serta Transportasi dan Pergudangan (5,87 persen). Nampaknya aktivitas masyarakat sudah mulai kembali pulih akibat pandemi Covid-19, walaupun belum sepenuhnya sama demgan keadaan normal.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahunan (yoy) semua komponen mengalami kontraksi. Yang terdalam adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar -15,71 persen, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar -1,01 persen dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK LNPRT) sebesar -0,17 persen. Di sisi lain, pertumbuhan dihasilkan oleh Ekspor Barang dan Jasa (1,00 persen) serta Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 0,04 persen.

Struktur PDRB (ADHB) dari sisi pengeluaran cenderung tidak berubah, PKRT mendominasi dengan 62,43 persen (Rp5,59 triliun), diikuti oleh PMTB (28,80 persen), Ekspor Barang dan Jasa (25,60 persen) serta PKP (18,96 persen). Penciptaan sumber pertumbuhan negatif tertinggi dihasilkan oleh PKP (-3,30 persen), diikuti oleh PMTB (-0,30 persen). Komponen lainnya mengalami pertumbuhan 3,53 persen.

Pertumbuhan ekonomi triwulanan dari sisi pengeluaran dihasilkan oleh pertumbuhan PKRT (5,55 persen) dan PK-LNPRT (3,23 persen). Tren pertumbuhan positif ini hendaknya tetap dijaga agar terus bertumbuh. Namun ada pekerjaan rumah besar yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu meningkatkan PKP pada sisa tahun anggaran 2020 agar dapat berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi Gorontalo.

#### 1.2. Inflasi

Grafik 1.4 Inflasi Bulanan (m to m) 2020

(0.39) (0.37) (0.18) (0.08) (0.03) (0

Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo

Grafik 1.5 Inflasi Tahunan (yoy) 2020



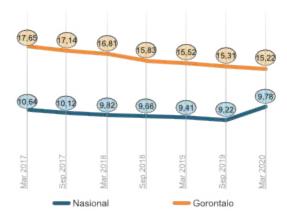
Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo

Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Gorontalo pada bulan Oktober 2020 adalah 103,95, mengalami kenaikan dari bulan September 2020 yaitu 103,82, perubahan ini menyebabkan inflasi sebesar 0,13 persen. Terdapat lima kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks, tertinggi di kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (0,67 persen). Di sisi lain, terdapat empat kelompok yang mengalami penurunan indeks, yang terdalam adalah Transportasi sebesar -0,58 persen. Sementara yang tidak mengalami perubahan indeks adalah kelompok Pendidikan serta Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Adapun komoditas yang berandil cukup besar terhadap terjadinya inflasi adalah Cabai Rawit (0,07 persen), Daging Ayam Ras (0,04 persen), Bawang Merah (0,04 persen) dan Tomat (0,03 persen).

Sampai dengan bulan Oktober 2020, inflasi dan deflasi di Kota Gorontalo cukup fluktuatif namun terkendali. Fluktuasi hanya di kisaran -0,33 sampai dengan 0,37. Deflasi terendah terjadi di bulan Mei 2020, sementara inflasi tertinggi di bulan Juni 2020. Pengendalian inflasi di Kota Gorontalo sangatlah baik, selalu di bawah rata-rata nasional. Hal ini terbukti pada bulan Oktober 2020 dengan keberhasilan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Gorontalo menjadi yang terbaik di antara 81 kota/kabupaten se-Sulawesi.

#### 1.3. Indikator Kesejahteraan

Grafik 1.6 Tren Presentase Penduduk Miskin di Profil kemiskinan di Provinsi Gorontalo



Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo

Grafik 1.7 Gini Ratio di Gorontalo



Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo

periode 2017-2020 mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Dari 203,19 ribu jiwa (16,81 persen) di bulan Maret 2017 menjadi 185,02 ribu jiwa (15,22 persen) pada bulan Maret 2020. Dari sisi jumlah turun sebanyak 18,17 ribu jiwa, sedangkan persentasenya turun 1,59 persen. Hal ini merupakan tren positif yang harus tetap dijaga bahkan lebih ditingkatkan untuk menekan jumlah penduduk miskin di Gorontalo.

Namun persentase penduduk miskin di Gorontalo pada periode bulan Maret 2020 sebesar 15,22 persen terbilang cukup tinggi, jauh di atas tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,78 persen. Berada di peringkat 5 tertinggi skala nasional. Bahkan di Pulau Sulawesi, Gorontalo mempunyai tingkat kemiskinan yang paling tinggi. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah untuk terus

berupaya menggalakkan program-program pengentasan kemiskinan di Gorontalo.

Masalah kesejahteraan yang lain adalah Ketimpangan/Kesenjangan pengeluaran penduduk

Gorontalo yang biasa diukur dengan Gini Ratio. Walaupun mengalami penurunan pada periode bulan September 2019-Maret 2020, dari 0,410 menjadi 0,408, namun angka tersebut masih di atas rata-rata nasional sebesar 0,317. Bahkan Gorontalo menduduki peringkat kedua tertinggi nasional di bawah DI Yogyakarta.

Sama halnya dengan tingkat kemiskinan, tingkat *Gini Ratio* Gorontalo secara umum juga menunjukkan tren positif. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah terus menerus mengupayakan pengurangan kesenjangan yang terjadi dengan implementasi program-program pemerataan yang berkesinambungan.



Pengangguran Dari sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Gorontalo periode Agustus 2020 naik menjadi 4,28 persen setelah sebelumnya pada periode Agustus 2019 berada pada level 3,76 persen. Angka ini jauh lebih baik dari rata-rata nasional sebesar 7,07 persen.

sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo Kenaikan tersebut sangat dimungkinkan sebagai dampak pandemi covid-19 telah memaksa berkurangnya aktivitas perekonomian yang menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Diharapkan, sejalan dengan menurunnya dampak pandemi covid-19, jumlah TPT juga akan menurun.

Fenomena unik ketenagakerjaan yang terjadi adalah penyumbang terbesar TPT adalah tenaga kerja lulusan SMK. Secara teori, lulusan SMK diharapkan sebagai tenaga kerja yang telah siap pakai, jadi dapat langsung bekerja. Hal ini mungkin dikarenakan belum tersambungnya ketrampilan lulusan SMK dengan lapangan kerja yang ada.

Grafik 1.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo

Indikator Kesejahteraan lain yang tidak kalah penting adalah pembangunan manusia, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tren pembangunan manusia Gorontalo terus meningkat hingga tahun 2019 dengan nilai IPM Gorontalo sebesar Berdasarkan klasifikasi BPS, angka tersebut masuk ke dalam kategori "Sedang" (60≤IPM≤70).

Dibandingkan dengan capaian IPM Nasional, Gorontalo masih terpaut gap cukup lebar. Hal

ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di Gorontalo masih tertinggal dibandingkan rata-rata provinsi lain. Namun dengan tren yang meningkat, arah pembangunan manusia Gorontalo sudah menunjukkan jalur yang benar. Ke depan diperlukan akselerasi pembangunan manusia untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

# BAB II

### Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN

Pada Bab ini dibahas perkembangan dan analisis pelaksanaan APBN di Provinsi Gorontalo hingga Triwulan III 2020

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan gambaran keuangan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan alokasi belanja dalam satu tahun anggaran yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hingga triwulan III 2020 terdapat banyak penyesuaian pagu anggaran baik belanja pemerintah pusat maupun belanja transfer ke daerah yang kemudian digeser untuk keperluan penanganan Covid-19. Perbedaan paling mencolok dapat dilihat pada menurunnya belanja modal. Namun pada transfer ke daerah khususnya Dana Alokasi Umum terdapat peningkatan yang disebabkan adanya tambahan alokasi untuk penanganan Covid-19.

Realisasi pendapatan negara hingga triwulan III tahun 2020 mencapai 53,80 persen dari estimasi penerimaan tahun 2020, dimana realisasi ini lebih banyak dibanding periode yang sama tahun anggaran 2019. Hal ini disebabkan penerimaan pajak di gorontalo didominasi belanja pemerintah pusat. Realisasi PNBP yang memiliki target lebih tinggi pada tahun ini justru hanya dapat direalisasikan sebesar 63,93 persen yang disebabkan berhenti beroperasinya BLU Bandar Udara Djalaludin akibat penerapan PSBB dan pada Universitas Negeri Gorontalo yang mengalami kuliah Jarak Jauh. Di sisi realisasi belanja negara mencapai 77,09 persen. Realisasi belanja negara meliputi belanja Pemerintah Pusat (68,36 persen) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (82,25 persen). Realisasi belanja ini dinilai cukup baik karena berada diatas target realisasi APBN triwulan III sebesar 60 persen dari pagu anggaran. Hal ini didorong oleh besarnya kebutuhan belanja untuk penanganan Covid-19 baik dari belanja pemerintah pusat maupun belanja penanganan Covid-19 yang melalui dana transfer.

Tabel 2.1 Realisasi Triwulan III 2020 APBN Prov. Gorontalo

limate.		2019		20	20	
URAIAN	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
PENDAPATAN DAN HIBAH	1.009,30	571,28	56,60	1.161,72	625,02	53,8
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.009,30	571,28	56,60	1,161,72	625,02	53,8
Penerimaan Perpajakan	868,49	453,13	52.17	917,75	469,06	51,1
Penerimaan Negara Bukan     Pajak	140,81	118,15	83,91	243,97	155,96	63,9
II, Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
BELANJA NEGARA	10.528,83	7.670,77	72.85	9.940,76	7.663,32	77,0
I. Belanja Pemerintah Pusat	3.776,47	2.523,20	66,81	3.695,25	2,526,10	68,3
1. Belanja Pegawai	1.222,91	966,27	79,01	1.374,35	982,21	71,4
2. Belanja Barang	1,636,36	1.074,21	65,65	1.376,97	878,21	63,7
3. Belanja Modal	906,70	473,29	52,20	935,36	659,53	70,5
7. Bantuan Sosial	10,50	9,43	89,81	8,57	6,15	71,7
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	6.752,36	5.147,57	76,23	6.245,51	5.137,22	82,2
1. Transfer ke Daerah	6.115,75	4.765,60	77,92	5.608,59	4.596,71	81,9
a. Dana Perimbangan	5.960,39	4.600,24	77,31	5,458,87	4.464,77	81,7
1) Dana Alokasi Umum	4,173,34	3,482,19	83,44	3.823,62	3.026,87	79,1
2) Dana Bagi Hasil	101,53	63,84	62,88	81,25	66,02	81,2
3) Dana Alokasi Khusus	1,675,52	1.054,21	62,92	1.554,00	1.371,88	88,2
b. Dana Transfer Lainnya	165,36	165,36	100	149,72	131,94	88,1
2. Dana Desa	636,61	381,97	60,00	636,92	540,51	84,8
SURPLUSIDEFISIT ANGGARAN	(9.519,53)	(7.099,49)	74.58	(8.779.04)	(7.038,30)	80,1

Terdapat realokasi APBN yang merupakan salah satu langkah memaksimalkan anggaran yang ada guna menanggulangi Pandemi Covid-19. Realokasi anggaran ini diperuntukkan untuk beberapa kegiatan-kegiatan khusus guna pencegahan persebaran Covid-19.

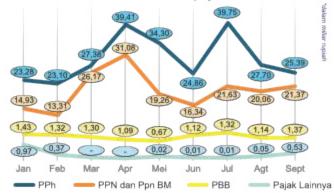


Sumber: I-Account OMSPAN, SIMTRAD4, dan LKPK Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo per 30 September 2020 (diolah)

#### 2.1. Pendapatan Negara

#### 2.1.1. Penerimaan Perpajakan

Grafik 2.1 Tren Penerimaan Perpajakan



Sumber: KPP Pratama Gorontalo, diolah

Ditengah menghadapi pandemi Covid-19, penerimaan dari pajak masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan objek pajak di gorontalo didominasi belanja pemerintah. Sehingga semakin besarnya realisasi belanja pemerintah berjalan seiring dengan penerimaan pajak. Hingga triwulan Ш 2020 penerimaan perpajakan di provinsi Gorontalo sebesar 64,19 persen dari target penerimaan sebanyak Rp719,81

miliar yang didominasi oleh penerimaan Pajak Penghasilan dengan porsi 57,39 persen, yang kemudiaan diikuti Pajak Pertambahan Nilai dengan porsi 39,86 persen, penerimaan pajak lainnya, pajak bumi dan bangunan.

#### a. Pajak Penghasilan (PPh)

Sampai dengan triwulan III tahun 2020 realisasi pendapatan PPh paling tinggi berasal dari Kota Gorontalo sebesar Rp143,94 miliar. Sementara realisasi terkecil berasal dari Kabupaten Boalemo sebesar Rp10,56 miliar atau 3,98 persen dari total pendapatan PPh lingkup Provinsi Gorontalo. Meskipun terdapat peningkatan realisasi PPh pada masing-masing Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo, kondisi ini dipengaruhi persebaran lapangan pekerjaan dan kemampuan ekonomi penduduk yang cukup timpang antar daerah di Gorontalo.

#### b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan PPnBM)

Realisasi pendapatan PPN sampai dengan triwulan III tahun 2020 paling tinggi berasal dari Kota Gorontalo sebesar Rp93,74 miliar atau 50,91 persen dari total pendapatan PPN lingkup Provinsi Gorontalo. Sementara realisasi terkecil berasal dari Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp6,88 miliar atau 3,74 persen dari total pendapatan PPN lingkup Provinsi Gorontalo. Secara umum realisasi PPN tiap-tiap kabupaten kota mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun anggaran sebelumnya, selain itu kondisi ini disebabkan berkurangnya konsumsi masyarakat dan kantor-kantor pemerintahan selama masa PSBB.

#### c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Realisasi pendapatan PBB sampai dengan triwulan III tahun 2020 hanya berasal dari satu kabupaten saja, yaitu Kabupaten Pohuwato sebesar Rp1,32 miliar atau 68,15 persen dari total pendapatan PBB lingkup Provinsi Gorontalo. Pendapatan PBB tersebut bersumber dari sektor P3 (Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan) yang secara didominasi berada di Kabupaten Pohuwato.

#### d. Pajak Lainnya

Realisasi pendapatan pajak lainnya sampai dengan triwulan III tahun 2020 paling tinggi berasal dari Kota Gorontalo sebesar Rp10,73 miliar atau 99,73 persen dari total pendapatan

pajak lainnya lingkup Provinsi Gorontalo. Sementara itu terdapat daerah yang realisasi pajak lainnya tidak ada sama sekali pada triwulan III 2020 yaitu Kabupaten Boalemo.

#### 2.1.2. Bea dan Cukai

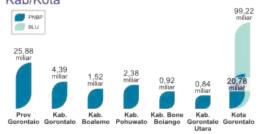


Grafik 2.2 Realisasi Bea Masukan dan Realisasi penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar sampai dengan triwulan III tahun 2020 sebesar Rp3.59 juta atau berasal dari pendapatan Bea Keluaran dan sebesar Rp5,63 miliar dari bea masukan dimana keduanya melebihi target. Kedepannya, diharapkan potensi ekspor di Provinsi Gorontalo dapat memberikan devisa yang besar demi kemajuan Provinsi Gorontalo

setelah optimalisasi ekspor membuahkan hasil yang signifikan pada tahun sebelumnya.

#### 2.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Grafik 2.3 Realisasi PNBP dan BLU per Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kab/Kota



Sumber: LKPP Provinsi Gorontalo, diolah

triwulan III tahun 2020 sebesar Rp93,29 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari PNBP Lainnya sebesar Rp40,09 miliar, dan pendapatan BLU sebesar Rp53,20 miliar. Penerimaan BLU didominasi oleh pendapatan pelayanan pendidikan jasa Universitas Negeri Gorontalo sebesar Rp45,95 miliar dan Pendapatan Jasa Bandar Udara di Bandar

Udara Djalaludin sebesar Rp3,89 miliar. Sementara Pendapatan bukan pajak lainnya disokong oleh PNBP yang ditatausahakan oleh satuan kerja yang memiliki target PNBP di masing-masing DIPAnya.

#### 2.2. Belanja Negara

DAK Fisik

Sumber: MEBE (ditpa.kemenkeu.go.id), diolah



DAK Non Fisik

Tabel 2.2 Realisasi Per Jenis Belanja

Jenis Belanja	BELANJA APBN		
33.113.23.11,4	Pagu	Realisasi	%
Pegawai	1,386,74	981,68	70,79
Barang	1.501,88	877,82	58,45
Modal	936,36	659,52	70,43
Bantuan Sosial	8,57	6,15	71,75
DAK Fisik	747,63	714,04	95,51
DAK Non Fisik	274,78	245,69	89,41
Dana Desa	636,92	540,52	84,86
TOTAL	5.492,89	4.025,42	73,28

Sumber: OMSPAN per 30 September 2020

Pandemi Covid-19 mempengaruhi APBN secara signifikan. Dari sisi belanja banyak dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada realokasi anggaran guna penanganan Covid-19. Di Provinsi Gorontalo belanja modal adalah belanja yang paling terdampak. Terdapat kebijakan berupa menunda pengadaan-pengadaan belanja modal yang bukan merupakan kegiatan prioritas dan belum dikontrakkan. Realisasi belanja APBN cukup terpengaruh dengan pelaksanaan PSBB di Provinsi Gorontalo mulai bulan April-Juni 2020,

Dana Desa

sehingga jika dibedah per jenis belanja terdapat penurunan realisasi pada periode PSBB. Sementara pada bulan Agustus terdapat realisasi Dana Cadangan DAK Tahap I yang berakhir bulan Agustus 2020.

#### 2.2.6. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Sampai dengan triwulan III tahun 2020 realisasi Dana Alokasi Khusus memiliki realisasi tertinggi hingga 88,28 persen, diikuti realisasi Dana Transfer lainnya yaitu Dana Insentif Daerah 88,12 persen dan Dana Desa 84,86 persen. Dana Alokasi Umum yang memiliki pagu terbesar telah di realisasikan 79,16 persen hingga triwulan III tahun 2020.

#### 2.2.7. Pengelolaan BLU

Tabel 2.3 Pagu dan Realisasi BLU s.d. Triwulan III 2020

Sumber		versitas Negeri Gorontalo		1	UPBU Djalaludin	
Dana	PAGU	Realisasi	%	PAGU	Realisasi	%
RM	138,19	95,38	69,02	21,57	15,37	71,26
BLU	83,34	8,7	10,44	23,47	11,12	47,38
TOTAL	221,53	104,08	46,98	45,04	26,49	58,81

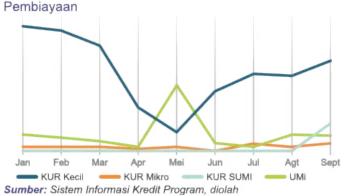
Sumber: OMSPAN per 30 September 2020

Badan Layanan Umum di Gorontalo ada 2 (dua), yaitu Universitas Negeri Gorontalo yang dikategorikan sebagai BLU sektor Pendidikan sejak tahun 2009. Sementara itu BLU Bandar Udara Djalaluddin ditetapkan sebagai satker BLU sejak tahun 2017. Dalam

kegiatannya BLU Universitas Negeri Gorontalo mampu tetap berkontribusi positif dalam penerimaan PNBP, sementara Bandar Udara Djalaludin terkendala dalam kegiatannya akibat pelaksanaan PSBB yang mana operasional penerbangan di Provinsi Gorontalo di tutup dalam rentang waktu tertentu.

#### 2.3. Manajemen Investasi Pusat

Grafik 2.5 Tren Jumlah Debitur KUR berdasar Skema Manajemen Investasi Pusat di lingkup

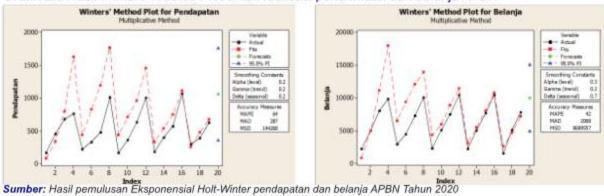


Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 berupa Kredit Program dalam wujud program Kredit Usaha Rakyat dan UMi. Total penyaluran hingga triwulan III 2020 senilai Rp524,08 miliar yang tersebar pada 22.419 debitur. Berdasarkan Skema terjadi penurunan jumlah debitur KUR Kecil (pinjaman Rp50-500jt), namun diiringi dengan

peningkatan penyaluran UMi (pinjaman s.d. Rp10jt) melalui lembaga keuangan bukan bank pada periode masa yang sama yaitu bulan Mei. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan usaha di Gorontalo mengalami peralihan dimasa pandemi yaitu erhati-hati melakukan pinjaman dan beralih pada pinjaman yang lebih kecil. Disaat PSBB mulai di relaksasi pada bulan Juni tren pinjaman KUR Kecil berangsur meningkat seiring mulai menggeliatnya perekonomian di Gorontalo. Ditambah pada bulan Agustus diperkenalkan Program KUR SUMI (pinjaman s.d. Rp10jt) disalurkan melalui bank tanpa bunga, khusus Ibu Rumah Tangga dan karyawan yang terkena PHK.

#### 2.4. Prognosis Realisasi APBN

Grafik 2.6 Hasil Winters' Method Plot untuk realisasi penerimaan dan belanja APBN



Prognosis Realisasi APBN di Gorontalo diukur menggunakan metode pemulusan Eksponensial Holt-Winter terhadap realisasi belanja dan pendapatan selama empat tahun, dari tahun 2016 hingga 2019 sehingga, Kemudian didapatkan prognosis realisasi penerimaan dan realisasi APBN sampai dengan triwulan IV tahun 2020.

Tabel 2.4 Perkiraan Realisasi APBN s.d. Triwulan IV

Uraian	Perkiraan Realisasi s.d Triwulan IV 2020
Pendapatan Negara	1.061,83
Belanja Negara	9.971,42
Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. G	orontalo (diolah)

Prognosis penerimaan negara sampai dengan akhir tahun diprediksi sebesar Rp1061,83 miliar. Sedangkan prognosis belanja negara sampai dengan akhir tahun diprediksi terealisasi sebesar Rp9971,42 miliar, dimana

proyeksi ini sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada tahun 2019. Namun hasil prognosis ini tidak mutlak mencerminkan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah di Tahun 2020 karena saat ini Indonesia sedang dilanda pandemic COVID-19, dimana banyak kebijakan dan aturan baru yang berpengaruh pada pelaksanaan anggaran. Selain itu, prognosis ini dihitung menggunakan data selama empat tahun, dimana keadaan sosial ekonomi pada saat itu berada pada kondisi normal, sehingga hasil prognosis ini dapat meleset diluar selang kepercayaan yang telah ditetapkan.



## BAB III Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD

Pada Bab ini dibahas perkembangan dan analisis pelaksanaan APBD di Provinsi Gorontalo hingga Triwulan III 2020

Periode Triwulan III 2020, postur APBD seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo kembali mengalami perubahan. Hal tersebut seiring dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam penanggulangan wabah Covid-19 dan dampak ekonomi yang timbul akibat Covid-19 di Indonesia.

Tabel 3.1 Profil APBD Tingkat Provinsi Triwulan III tahun 2019-2020

Heritan	201	9	202	0
Uraian	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
PENDAPATAN	8.486,70	5.952,26	8.062,42	5.476,99
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.083,76	657,73	980,23	569,09
Pendapatan Transfer	6.870,62	5.202,45	6.944,86	4.805,07
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	532,32	92,08	137,31	102,85
BELANJA	7.464,23	4.317,45	7.631,98	4.032,41
Belanja Operasi	5.945,37	3.813,79	6,186,03	3.467,60
Belanja Pegawai	3.212,69	2.082,58	3.362,69	2.079,35
Belanja Barang dan Jasa	2.311,73	1.496,21	2,376,56	1,195,91
Belanja Bunga	0	0	0	0
Belanja Subsidi	0	0	0	0
Belanja Hibah	318,97	192,18	399,57	177,81
Belanja Bantuan Sosial	101,98	44,82	47,21	14,52
Belanja Modal	1.512,04	501,35	1,377,53	523,17
Belanja Tak Terduga	6,82	2,31	68,42	62,04
TRANSFER	1.093,78	707,14	1.182,75	591,33
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	8.558,01	5.024,59	8.814,73	4.624,14
SURPLUS/DEFISIT	-71,31	927,68	-752,30	852,85

Terdapat realokasi APBD yang merupakan salah satu langkah memaksimalkan anggaran yang ada guna menanggulangi Pandemi Covid-19. Realokasi anggaran ini berkutat pada DAK Fisik dan DAK Non Fisik, untuk kemudian dialihkan pada kegiatan-kegiatan khusus guna



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi Gorontalo (LKPDK), diolah

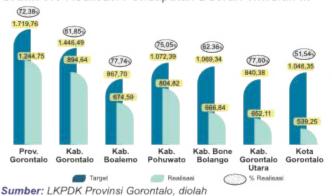
Di sisi pendapatan, terjadi penurunan target jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar minus 0,93 persen. Penurunan terjadi baik di komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun komponen Transfer Pemerintah Pusat. Sedangkan di sisi Belanja, total pagu belanja APBD seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan sebesar 2,25 persen (q to q). Kenaikan terjadi pada komponen Belanja Operasi yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial, dan komponen Belanja Tak Terduga.

Sampai dengan Triwulan III 2020 agregat realisasi pendapatan APBD mencapai 67,93 persen mengalami kontraksi sebesar minus 7,98 persen (yoy). Sedangkan di sisi belanja, realisasi Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo mencapai 52,84 persen juga mengalami kontraksi sebesar minus 6,59 persen (yoy).

#### 3.1. Pendapatan Daerah

Secara agregat, proporsi pagu pendapatan Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo masih di dominasi oleh sumber Pendapatan Transfer yang mencapai 86 persen dari total target pendapatan daerah. Sampai dengan periode triwulan III 2020, agregat realisasi pendapatan di Provinsi Gorontalo mencapai Rp5.476,99 miliar atau 67,93 persen dari target pendapatan daerah. Realisasi pendapatan daerah tersebut sebagian besar bersumber dari pendapatan

Grafik 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan III



transfer pemerintah pusat yang mencapai 83,83 persen. Sementara itu kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah di Provinsi Gorontalo hanya sebesar 10,39 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah masih sangat bergantung terhadap dana transfer pemerintah pusat.

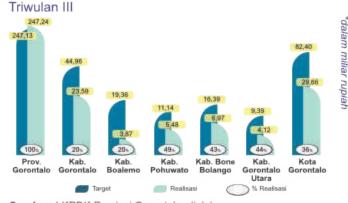
#### 3.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah memiliki kontribusi paling tinggi terhadap PAD yaitu sebesar 90 persen dari total target PAD. Penyesuain APBD sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 menyebabkan PAD Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo kembali mengalami penurunan sebesar minus 0,37 persen (q to q). Sementara tingkat realisasi PAD di Provinsi Gorontalo sampai dengan triwulan III 2020 hanya mencapai Rp569,08 miliar atau 58,06 persen dari target, terkontraksi minus 13,48 persen (yoy).

dalam miliar rupiar

#### a. Penerimaan Pajak Daerah

Grafik 3.2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah



Sumber: LKPDK Provinsi Gorontalo, diolah

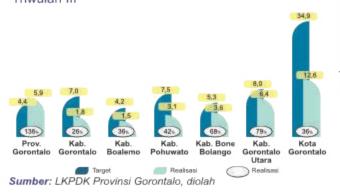
Agregat realisasi Penerimaan Pajak Daerah hingga triwulan III tahun 2020 sebesar Rp320,92 miliar, terkontraksi minus 13,97 persen (yoy). Hal tersebut sebagai dampak dari kebijakan relaksasi pajak daerah oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka penanganan Covid-19, selain itu dipengaruhi juga oleh aktivitas perekonomian di Gorontalo yang belum kembali normal.

Realisasi penerimaan pajak daerah di Provinsi Gorontalo didominasi oleh pajak daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu sebesar Rp247,24 miliar atau 77 persen dari total penerimaan pajak daerah. Pajak daerah Pemerintah Provinsi didominasi oleh pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak rokok. Sedangkan pada Kabupaten/Kota, realisasi pajak daerah didominasi oleh Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

#### b. Penerimaan Retribusi Daerah

Secara agregat, realisasi Penerimaan Retribusi Daerah hingga triwulan III 2020 adalah sebesar Rp34,98 miliar, terkontraksi sebesar minus 0,84 persen (yoy). Kota Gorontalo menjadi daerah dengan realiasi Penerimaan Retribusi Daerah terbesar yaitu sebesar Rp12,6

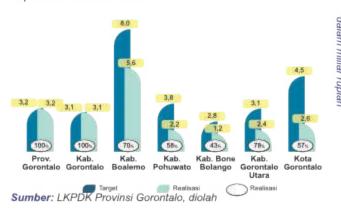
Grafik 3.3 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan III



miliar, namun hanya mencapai 36 persen dari total target penerimaan. Penerimaan Retribusi Daerah tersebut sebagian besar di peroleh dari hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Prof Dr Aloei Saboe. Sumber penerimaan retribusi daerah lain di Provinsi Gorontalo diantaranya retribusi pelayanan parkir, retribusi kebersihan, dan retribusi izin mendirikan bangunan.

#### c. Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

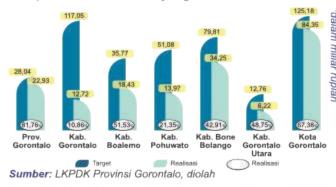
**Grafik 3.4** Realisasi Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Triwulan III



Sampai dengan triwulan III 2020, penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Dipisahkan telah terealisasi yang sebesar Rp20,3 miliar atau sebesar 71,34 persen, terkontraksi minus 39,86 Penerimaan Hasil persen (yoy). Kekayaan Daerah yang Dipisahkan didominasi penerimaan dari Bagian atas Penyertaan Perusahaan Milik Daerah pada PT. Bank Sulutgo.

#### d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

**Grafik 3.5** Realisasi Penerimaan Target Komponen Lain-lain PAD yang Sah Triwulan III



dengan triwulan 2020. penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah telah terealisasi sebesar Rp192,87 miliar dengan kontribusi terhadap PAD sebesar 36,92 persen. Mengalami kontraksi minus 10,56 persen (yoy), sebagai dampak dari kebijakan penanganan Covid-19 yang mengakibatkan belum maksimalnya penerimaan pada sektor Jasa Giro Kas

Daerah, Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD, dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN. Kota Gorontalo menjadi penyumbang penerimaan terbesar dengan realisasi sebesar Rp84,35 miliar atau 43,7 persen dari total penerimaan.

#### 3.1.2. Pendapatan Transfer

Agregat realisasi pendapatan transfer Pemerintah Pusat di Provinsi Gorontalo pada triwulan III 2020 sebesar Rp4.670,75 miliar atau 69,11 persen dari target pendapatan, terkontraksi minus 7,92 persen (yoy). Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh adanya penurunan pagu Dana

Grafik 3.6 Komposisi Pendapatan Transfer Ke Daerah dari Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Pusat



Sumber: LKPDK Provinsi Gorontalo, diolah

Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat, dan perubahan-perubahan regulasi penyaluran Dana Transfer Pemerintah Pusat ke daerah pada dalam rangka penanganan Covid-19.

Realisasi pendapatan transfer hingga triwulan III 2020 didominasi oleh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3.123,16 miliar atau 76,53 persen. Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari DAK Fisik, Cadangan

DAK Fisik dan DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp1.030,97 miliar atau 60,61 persen, mengalami kenaikan 3,23 persen (yoy). Adanya kebijakan pemerintah untuk menyalurkan seluruh DAK Fisik dan Cadangan DAK Fisik pada bulan Agustus dan September 2020 menjadi faktor yang mempengaruhi realisasi DAK.

#### 3.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

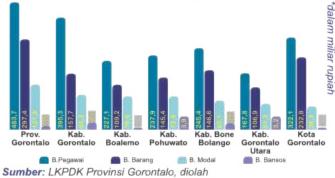
Hingga triwulan III 2020, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah di Provinsi Gorontalo sebesar Rp102,85 miliar atau sebesar 74,90 persen, mengalami peningkatan 11,69 persen (yoy). Realisasi tersebut sebagian besar bersumber dari hibah baik Pemerintah Pusat maupun Lembaga lainnya.

#### 3.2. Belanja Daerah

Secara umum, pagu Belanja APBD pada triwulan III 2020 mengalami kenaikan 2,25 persen (tot), dan 7,57 persen (q to q). Kenaikan pagu belanja tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Agregat realisasi belanja APBD Provinsi Gorontalo hingga triwulan III 2020 masih rendah yaitu sebesar Rp4.032,81 miliar atau sebesar 52,84 persen, terkontraksi minus 6,59 persen (yoy), dan hanya mengalami pertumbuhan sebesar 17,73 persen (q to q).

#### 3.2.1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial

Grafik 3.7 Realisasi Jenis Belanja Triwulan III

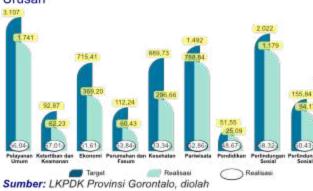


Sampai dengan triwulan III 2020, agregat realisasi belanja APBD di Provinsi Gorontalo sebesar Rp4.032,81 miliar atau 52,84 persen. Realisasi tersebut masih di dominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp2.079,35 miliar dengan rasio belanja sebesar 51,56 persen terhadap total realisasi belanja APBD. Sementara belanja barang dan belanja modal, hanya terealisasi sebesar 50,32 persen dan

36,53 persen dari total pagu. Rendahnya realisasi belanja barang dan belanja modal menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya kontraksi sebesar minus 15,71 persen pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P).

#### 3.2.2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Grafik 3.8 Pagu dan Realisasi Belanja Per Urusan



Urusan Pendidikan merupakan sektor dengan realisasi tertinggi yaitu sebesar 58,32 persen. Sementara itu, urusan ekonomi yang menjadi pendorong dalam upaya pemulihan ekonomi di Gorontalo terealisasi sebesar 51,61 persen. Sektor pertanian dan sektor kelautan dan perikanan yang menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo telah terealisasi sebesar 49,15 persen dan 54,75 persen. Sedangkan

sektor UMKM yang didorong perkembangannya dalam program PEN telah terealisasi sebesar 62,78 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah perlu mendorong realisasi sektor-sektor yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian.

#### 3.3. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020

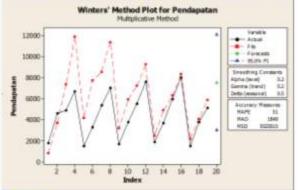
Berdasarkan tren realisasi APBD di Provinsi Gorontalo dalam empat tahun terakhir, akan dihitung prognosis Realisasi APBD di Gorontalo menggunakan metode pemulusan Eksponensial *Holt-Winter* Multiplikatif dalam Grafik 3.9, didapatkan prognosis realisasi penerimaan dan realisasi APBD sampai dengan triwulan IV tahun 2020. Prognosis penerimaan daerah sampai dengan akhir tahun akan terealisasi sebesar 93,53 persen atau sekitar Rp7.540,28 Miliar. Sedangkan prognosis belanja daerah sampai dengan akhir tahun diproyeksikan terealisasikan sebesar Rp8.091,23 Miliar atau 98,66 persen dari pagu belanja daerah. Proyeksi pendapatan daerah yang dihasilkan sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan pada tahun 2019. Namun hasil prognosis ini tidak mutlak mencerminkan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah di Tahun 2020 karena saat ini Indonesia sedang dilanda pandemic COVID-19, dimana banyak kebijakan dan aturan baru yang berpengaruh

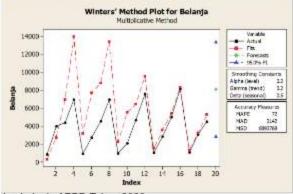
Tabel 3.2 Perkiraan Realisasi APBD s.d. pada pelaksanaan anggaran. Selain itu sampai dengan

Triwulan IV Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV Uraian PAGU Realisasi 96 Pendapata 7.540,38 8.032.42 93.53 Belanja 8.201,45 8.091,23 98,66 Daerah Sumber: LKPDK Provinsi Gorontalo (diolah)

Triwulan III di Provinsi Gorontalo, realisasi belanja Pemerintah Daerah belum mencapai target 60%, pemerintah daerah cenderung untuk membelanjakan anggaran di akhir tahun sehingga proyeksi ini kemungkinan dapat berubah.

Grafik 3.9 Hasil Winters' Method Plot untuk realisasi penerimaan dan belanja APBD





Sumber: Hasil pemulusan Eksponensial Holt-Winter pendapatan dan belanja APBD Tahun 2020



## **BAB IV**

## Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

Pada Bab ini dibahas mengenai anggaran konsolidasian Pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 dan kontribusinya terhadap PDRB Gorontalo

Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan III tercatat mengalami defisit sebesar Rp 6,331,23 Triliun, lebih dalam 5,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah terdapat kontraksi yang cukup dalam pada pendapatan

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Gorontalo Triwulan III

URAIAN	Q3 2019		Q3 2020		Developer
UKAIAN	Konsolidasi	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Perubahan
Pendapatan Negara	1.402,25	625,03	5.147,33	1.043,89	-25,56%
Pendapatan Perpajakan	826,31	469,07	320,92	789,98	-4,40%
Pendapatan Bukan Pajak	485,73	155,97	248,16	211,25	-56,51%
Hibah	67,31	0,00	42,65	42,65	-36,64%
Transfer*)	22,89	0,00	4.728,48	0.00	-100%
Belanja Negara	7.492,89	2.922,02	4.487,36	7.409,37	-1,11%
Belanja Pemerintah	6.842,48	2.526,13	4.032,81	6.558,94	-4,14%
Transfer	650,41	588,76	454,54	850,43	30,75%
Surplus/Defisit	-6.090,64	-2.296,98	659,98	-6.365,49	4,51%
Pembiayaan	90,37	0,00	34,26	34,26	-62,09%
Penerimaan Pembiayaan	131,92	0,00	48,01	48,01	-63,61%
Pengeluaran Pembiayaan	41,55	0,00	13,75	13,75	-66,91%
SILPA	-6.000,27	-2.296,98	694,23	-6.331,23	5,52%

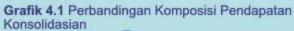
<sup>\*)</sup> Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat.

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) Provinsi Gorontalo, diolah

konsolidasian di Provinsi Gorontalo pada semua pos pendapatan. Hal ini juga didukung oleh adanya pertumbuhan negatif pada belanja konsolidasian terutama pada pos belanja pemerintah.

#### 4.1. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

#### 4.1.1. Analisis Proporsi dan Perbandingan





Sumber: LKPK Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, diolah

Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi Gorontalo pada Triwulan III Tahun 2020 merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan realisasi di dua tahun sebelumnya. Terjadi penurunan diseluruh pos Pendapatan Konsolidasian, dengan kontributor terbesar berada pada pos Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tumbuh negatif menjadi Rp 211,25 Miliar atau turun 56,51 persen (yoy). Penurunan ini disebabkan karena salah satu pos Penerimaan Negara Bukan Pajak pada

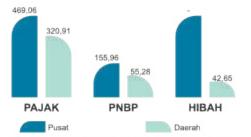
<sup>&</sup>quot;) Terdapat selisih antara belanja transfer yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pendapatan Pemerintah Daerah, Kekurangan tersebut dikonsolidasikan dari Lain-lain Pendapatan yang sah Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah menjadi pos yang dieliminasi untuk mengoreksi selisih antara belanja transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer pemerintah daerah.

Penerimaan Perpajakan Konsolidasian sampai Triwulan III Tahun 2020 tumbuh negatif sebesar 4,4 persen (yoy) menjadi Rp789,98 Miliar. Dilihat dari komponennya, PPN Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 masih menjadi komponen utama penerimaan pajak yang mencapai 41,9 persen dari total penerimaan perpajakan. Dari sisi pertumbuhan penciptaan sumber Penerimaan Perpajakan konsolidasian Triwulan III-2020 (y-on-y), PPh Pasal 21 merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan positif tertinggi yaitu sebesar 1.41 persen. Sementara itu, komponen sumber pertumbuhan negatif tertinggi pada Penerimaan Perpajakan konsolidasian adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yaitu sebesar 2,76 persen.

Secara nominal, Penerimaan Negara Bukan Pajak Konsolidasian pada Triwulan III 2020 merupakan yang terendah dibandingkan realisasi dua tahun sebelumnya. Dari sisi pertumbuhannya, Penerimaan Negara Bukan Pajak Konsolidasian mengalami kontraksi yang sangat dalam, yaitu sebesar 56,51 persen (yoy) dan 26,27 persen (q to q). Dari segi komposisinya, Pendapatan BLU masih menjadi kontributor utama, yaitu sebesar 39,08 persen. Beberapa pos juga terkena dampak kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19, antara lain Pos Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian dan pos Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan.

Pusat dan Daerah terhadap Konsolidasian Tw III



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, diolah

Grafik 4.2 Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pemerintah Pusat menyumbang 59,88 persen Pendapatan Konsolidasian Triwulan III Tahun 2020 di Provinsi Gorontalo. terjadi peningkatan kontribusi pendapatan pemerintah pusat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, hal ini diakibatkan adanya penurunan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak Konsolidasian sebesar 22,42 persen, dimana terdapat penurunan signifikan

terhadap pos penerimaan kembali belanja modal Tahun Anggaran Yang Lalu, Deviden atas Penyertaan Modal pada BUMD, Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, dan Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian. Sementara itu, Pendapatan Pajak Pemerintah pusat masih didominasi oleh Pendapatan PPN Dalam Negeri dan Pendapatan PPh 21, dimana PPN Dalam Negeri tumbuh negatif sebesar -0,5 persen (yoy), sementara PPh Pasal 21 tumbuh positif sebesar 8,8 persen (yoy).

#### 4.1.2. Analisis Perubahan

Pendapatan pajak dalam negeri masih menjadi sumber utama penerimaan perpajakan di Provinsi Gorontalo. Penerimaan perpajakan pemerintah Pusat masih lebih tinggi daripada penerimaan pajak daerah meskipun penerimaan pajak pemerintah pusat masih tergantung dari potongan-potongan belanja pemerintah. Sementara itu, Penerimaan pajak daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah belum menunjukkan perkembangan yang berarti.

Grafik 4.3 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Sementara itu, kontribusi Pajak Perdagangan Pusat dan Daerah terhadap Konsolidasian Interpasional tercatat masih sangat rendah



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, diolah

Internasional tercatat masih sangat rendah, hanya menyumbang Rp5.63 Miliar atau 1,2 persen dari total pendapatan konsolidasian Provinsi Gorontalo. Walaupun begitu, pada Triwulan III ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan Pada Pos Pendapatan Bea Masuk, yaitu 4088,8 persen atau sebesar Rp5,5 Miliar. Di sisi lain, meskipun di Gorontalo pada Triwulan III mengalami lonjakan ekspor,

namun realisasi penerimaan pada pos bea keluar masih sangat rendah.

## 4.1.3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan konsolidasian

**Tabel 4.2** Realisasi Pendapatan Konsolidasian di wilayah Provinsi Gorontalo Triwulan III 2019

(Garten	Realis	Manager	
Uraian	2019	2020	Kenaikan
Penerimaan Perpajakan	826,31	789,98	-4,40%
PNBP	485,73	211,25	-56,51%
Hibah	67,31	42,65	-36,64%
Total Pendapatan	1.402,25	818,59	3,79%
PDRB/Pert. Ekonomi	7.183,85	7.178,92	-0,07%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Provinsi Gorontalo dan BPS, diolah Ekonomi Gorontalo di Triwulan III 2020 kontraksi sebesar mengalami persen (yoy). Kontraksi Pertumbuhan ekonomi menunjukan bahwa terjadi penurunan pada kegiatan produksi dan konsumsi barang dan jasa, yang dapat berakibat langsung pada pendapatan pajak konsolidasian yang terkontraksi -4.4 **PDRB** sebesar persen. menggambarkan jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenai pajak. Jika

kegiatan ekonomi masyarakat terus berkembang akan menjadi potensi yang baik bagi pengenaan pajak di wilayah tersebut. Rasio Pajak terhadap PDRB di Gorontalo adalah sebesar 7,49 persen, masih sangat jauh dibandingkan Rasio Pajak Nasional.

#### 4.2. BELANJA KONSOLIDASIAN

#### 4.2.1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik 4.4 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat Realisasi Belanja Konsolidasian Ronsolidasian Sampai dengan Triwulan III



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Provinsi Gorontalo, diolah

Triwulan sampai dengan Tahun 2020 mencapai 7,409.37 Miliar, dimana belanja Pemerintah Daerah berkontribusi 60,5 persen dari total belanja konsolidasian. Porsi belanja pegawai masih menjadi yang terbesar baik pada belanja pemerintah pusat maupun belanja pemerintah daerah. Hal

ini mengindikasikan bahwa ruang fiskal pemerintah guna mendorong roda dan pertumbuhan

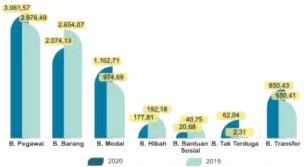
ekonomi masih mengandalkan pengeluaran yang dibelanjakan oleh para Aparatur Sipil Negara. Hal ini sejalan dengan komposisi PDRB Q3 Tahun 2020, dimana komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga bangkit dan tumbuh sebesar 0,04 persen dan porsinya terhadap PDRB Triwulan III Tahun 2020 masih yang terbesar dan meningkat menjadi 62,43 persen.

Kontribusi belanja barang pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing sebesar 30 persen dan 27 persen dari total belanja. Porsi terbesar belanja barang pada pemerintah pusat adalah pada pos Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang mencapai Rp125,35 Miliar atau Rp14,22 persen dari total belanja barang pemerintah pusat. Sementara itu, porsi terbesar belanja barang pada pemerintah daerah berada pada pos Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Jasa Kantor.

#### 4.2.2. Analisis Perubahan

Belanja Konsolidasian Provinsi Gorontalo sampai Triwulan III Tahun 2020 tercatat mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sebesar -1,11 persen (yoy). Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan belanja pemerintah sebesar Rp 283,54 Miliar atau -4,14 persen (yoy), dimana

Grafik 4.5 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi kontribusi Gorontalo Triwulan III tahun 2019-2020 terbesar be



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Provinsi

kontribusi pertumbuhan negatif terbesar berasal dari belanja barang yang mengalami kontraksi sebesar -21,9 persen atau Rp579,94 Miliar.

Pada Pemerintah Pusat, pos Belanja Perjalanan Biasa mengalami penurunan tertinggi, yaitu sebesar Rp62,98 Miliar atau -54,95 persen (yoy) disusul dengan pos Belanja Output Kegiatan

mengalami penurunan sebesar Rp43,96 Miliar atau 67,33 persen. Sementara itu pada Pemerintah Daerah, pos Belanja Perjalanan Dinas mengalami penurunan mencapai Rp187,4 Miliar atau -43,51 persen (yoy). Hal ini disebabkan karena Pemerintah telah mengeluarkan berbagai skema percepatan penyaluran Dana Transfer.

#### 4.2.3. Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional

Terdapat pola linear yang terlihat antara belanja konsolidasian, pertumbuhan ekonomi, dan Inflasi. Pada triwulan III tahun 2020, pertumbuhan ekonomi tumbuh positif sebesar 2,98 persen (q to q) dan didukung dengan inflasi Kota Gorontalo yang rendah yaitu 0,07. Pertumbuhan positif ini tidak sejalan dengan belanja konsolidasian yang mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. Artinya, Jumlah dana yang dibelanjakan pemerintah telah belum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Gorontalo secara maksimal, dimana penurunan belanja pemerintah berbanding terbalik dengan peningkatan aktivitas ekonomi pada triwulan III Tahun 2020.

# 4.3. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Berdasarkan data dari Laporan Operasional Government Finance Statistics (GFS) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, pengeluaran konsumsi pemerintah Gorontalo sampai Triwulan III

**Tabel 4.3** Ringkasan Laporan Operasional Provinsi Gorontalo

	Akun Statistik Keuangan Pemerintah	Jumlah
YANG	MEMPENGARUHI KEKAYAAN NETTO BE	RSIH:
	Pendapatan	9.194.538.881.850
	Pajak	789.983.864.743
	Kontribusi Sosial	***
	Hibah	154.325.211.392
	Pendapatan Lainnya	8.250.229.805.7115
	Beban	6.549,012,478,965
	Kompensasi Pegawai	3.062.034.044.218
	Penggunaan Barang dan Jasa	1.835.100.020.431
	Konsumsi Aset Tetap	***
	Bunga	0
	Subsidi	0
	Hibah	1.302.247.001.669
	Manfaat Sosial	20.676.487.409
	Beban Lainnya	328.954.925.238
	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	2.645.526.402.885
	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	2.645.526.402.885
ASET	NON KEUANGAN:	
A31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	1.162.711.793.646
A311	Aset Tetap	1.131.427.431.671
A312	Perubahan Persediaan	0
A313	Barang Berharga	
A314	Aset Non Produksi	31.284.361.975
NLB	Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto (1- 2+NOBz-31)	1.482.814.609.239
TRANS	AKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN	(PEMBIAYAAN):
A32	Akuisisi Neto Aset Keuangan	1.477.885.193.613
A321	Dalam Negeri	1.477.885.193.613
A322	Luar Negeri	-
A323		-
A33	Keterjadian Kewajiban Neto	
A331	Dalam Negeri	
A332	Luar Negeri	-
	-	
	I ASET A31 A311 A312 A313 A314 NLB TRANS A32 A321 A322 A323 A33	Pendapatan Pajak Kontribusi Sosial Hibah Pendapatan Lainnya Beban Kompensasi Pegawai Penggunaan Barang dan Jasa Konsumsi Aset Tetap Bunga Subsidi Hibah Manfaat Sosial Beban Lainnya Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz) Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz) Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz) I ASET NON KEUANGAN: A31 Akuisisi Aset Non Keuangan Neto A311 Aset Tetap A312 Perubahan Persediaan A313 Barang Berharga A314 Aset Non Produksi NLB Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31) TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN A32 Akuisisi Neto Aset Keuangan A321 Dalam Negeri A323 Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus (SDRs) A33 Keterjadian Kewajiban Neto A331 Dalam Negeri

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Provinsi Gorontalo, BPS (diolah)

**Tabel 4.4** Realisasi Pendapatan Konsolidasian di Pusat wilayah Provinsi Gorontalo Triwulan III 2019 dan 2020

	Realisasi (Milyar Rupiah)	Kontribusi (%)
P-KP	6.549,01	20,88%
PMTB	1.131,43	3,61%
Belanja Konsolidasian	7.409,37	
PDRB	31.359,07	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, BPS, diolah

Tahun 2020 berkontribusi sebesar 20,88 persen terhadap PDRB. Sementara itu, realisasi investasi pemerintah berkontribusi sebesar 3.61 persen terhadap PDRB Gorontalo. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi provinsi gorontalo mengalami perlambatan, hal ini merupakan salah satu dampak dari penyebaran COVID-19 dan ketidakpastian ekonomi global.

Kondisi ini diperburuk Tingkat Terbuka Provinsi Pengangguran Gorontalo yang mengalami kenaikan menjadi 4,48 persen pada Agustus 2020. Berdasarkan data BPS, 118.192 orang penduduk usia kerja terdampak Covid-19, 6310 orang pengangguran karena Covid-19, 5730 orang sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan 103,299 orang bekerja dengan pengurangan jam kerja karena Covid-19.

Dalam kondisi perekonomian Gorontalo melambat, akselerasi sedang yang pengeluaran konsumsi pemerintah sangat dibutuhkan agar multiplier effect dari belanja pemerintah benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah dan Daerah pada kuartal berikutnya perlu melakukan upaya penambahan belanja pemerintah untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Gorontalo dalam rangka meningkatkan aktivitas perdagangan dan penguatan daya beli masyarakat dari sisi belanja pegawai dan belanja barang.



# BAB V Berita Fiskal Terpilih

Bab ini membahas mengenai pengaruh perubahan PDRB terhadap perubahan konsumsi rumahtangga dan kaitannya dengan pandemi COVID-19 yang melanda Provinsi Gorontalo.

#### OPTIMALISASI BELANJA PEMERINTAH UNTUK AKSELERASI LAJU PEREKONOMIAN GORONTALO DI *ERA NEW* NORMAL

#### 5.1. Perkembangan Covid-19 di Gorontalo

Sejak awal kemunculan covid-19 di Gorontalo pada tanggal 10 April 2020 sampai dengan saat ini, 3.045 orang telah dinyatakan positif terjangkit covid-19, dengan tingkat kesembuhan 95,82 persen atau 2.918 orang telah dinyatakan sembuh dan 83 orang meninggal. Dilihat dari sebaran wilayahnya, Kota Gorontalo merupakan wilayah terbesar penyebaran covid-19, di mana 40,1 persen dari total kasus di Provinsi Gorontalo berasal dari Kota Gorontalo yang merupakan pusat perekonomian di Provinsi Gorontalo.

Jika dilihat berdasarkan kelompok usia, mayoritas pasien covid-19 di Gorontalo berusia 19 sampai 45 tahun, artinya pasien covid-19 merupakan usia produktif yang aktif dalam kegiatan ekonomi, sehingga dengan terdampaknya usia produktif akan sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Gorontalo di Triwulan III 2020.

Jika dibandingkan dengan daerah lainnya, Provinsi Gorontalo berada pada posisi ke-24 berdasarkan jumlah kasus positif covid-19, jauh berada di bawah angka rata-rata nasional dan hanya menyumbang 0,695 persen terhadap angka kasus terkonfirmasi covid-19 nasional. Namun dengan jumlah penduduk yang hanya 1,2 juta penduduk dengan mayoritas angkatan kerja bekerja di sektor informal, adanya covid-19 sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku usaha di sektor jasa, perhotelan, dan perdagangan.

#### 5.2. Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo di Era Pandemi

Secara umum, kondisi ekonomi global masih terdampak pandemi covid-19. Indonesia masih terkontraksi -3,49 persen (yoy). Namun ini lebih baik dari kondisi triwulan sebelumnya yang terkontraksi -5,32 persen. Tren positif ini menunjukkan pertanda pemulihan ekonomi sudah Grafik 5.1 Kasus Positif covid-19 Berdasarkan Kelompok mulai berjalan. Untuk jangka pendek Usia



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, diolah

(q to q), bahkan Indonesia mampu tumbuh positif 5,05 persen.

Senada dengan perekonomian nasional, Gorontalo juga masih terdampak pandemi covid-19. Gorontalo terkontraksi -0,07 persen, angka ini jauh lebih kecil dari kontraksi yang terjadi di tingkat nasional. Pertumbuhan ekonomi triwulanan (q to

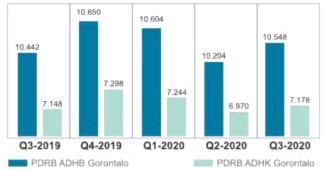
q) Gorontalo juga mengalami kenaikan positif sebesar 2,98 persen. Namun pertumbuhan ini di bawah rata-rata nasional yang mampu mencapai positif 5,05 persen.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tahunan (yoy) hanya terjadi di sebagian lapangan usaha, yaitu Jasa Keuangan (14,21 persen), Pengadaan Listrik dan Gas (9,43 persen) serta Informasi dan Komunikasi (9,09 persen), tumbuh 4,92 persen, selain itu tumbuh negatif. Pertumbuhan ini tidak lepas dari New Normal Life, masyarakat lebih sering berada di rumah dan bekerja atau sekolah dari rumah. Sementara jika dilihat dari struktur PDRB (ADHB), penyumbang kontribusi terbesar masih didominasi oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 39,36 persen (Rp4,15 triliun).

Berbeda dengan pertumbuhan tahunan (yoy), ekonomi triwulanan (q to q) menunjukkan hal yang cukup menggembirakan, karena berhasil tumbuh 2,98 persen. Pertumbuhan tertinggi

10.650

Grafik 5.2 Perbandingan Ekonomi Gorontalo dan Nasional Tahun 2019-2020



4,05 5.02 4,97 2,97 Pertumbuhan Gorontalo (yoy) Pertumbuhan Nasional (vov)

Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo, diolah

dihasilkan oleh Industri Pengolahan (8,30 persen), yang merupakan hasil dari pertumbuhan industri kelapa di Gorontalo. Selanjutnya diikuti oleh Jasa Keuangan dan Asuransi (5,89 persen) serta Transportasi dan Pergudangan (5,87 persen). Nampaknya aktivitas masyarakat sudah mulai kembali pulih akibat pandemi Covid-19, walaupun belum sepenuhnya sama demgan keadaan normal.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahunan (yoy), Sebagian besar komponen mengalami kontraksi. Yang terdalam adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar -15,71 persen, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar -1,01 persen Struktur PDRB (ADHB) dari sisi pengeluaran cenderung tidak berubah, PKRT mendominasi dengan 62,43 persen (Rp5,59 triliun), diikuti oleh PMTB (28,80 persen), Ekspor Barang dan Jasa (25,60 persen) serta PKP (18,96 persen).

Pada Triwulan III, beberapa sektor pemebentuk PDRB dari sisi produksi dan pengeluaran menunujukan kondisi yang tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan Triwulan II 2020. Kontributor utama pembentuk PDRB dari sisi produksi mengalami pertumbuhan negatif. Sedangkan dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah pun tetap konsisten mengalami kontraksi. Satu-satunya komponen yang berhasil bangkit di Triwulan III adalah Konsumsi Rumah Tangga yang berhasil meraih pertumbuhan positif sebesar 0,04 persen (yoy) setelah pada Triwulan II terpuruk diangka -3,9 persen (yoy).

#### 5.3. Kontribusi Negatif Belanja Pemerintah

Grafik 5.3 Perbandingan Sektor Pembentuk PDRB Triwulan II Menarik untuk mencermati salah dan III 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo

Menarik untuk mencermati salah satu komponen pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran yaitu PKP, karena terdapat fenomena yang tidak linear antara PKP nasional dengan PKP Gorontalo. Secara nasional, PKP berkontribusi positif terhadap

petumbuhan ekonomi. Sementara itu terjadi sebaliknya di Gorontalo, PKP berkontribusi negatif, menjadi beban pertumbuhan.

Dilihat dari tren pertumbuhan, dengan membandingkan antara PKP nasional dan PKP Gorontalo, pada tahun 2019 kecenderungannya relatif sama, rendah di awal tahun dan memuncak di akhir tahun. Pada tahun 2020, di awal tahun bersamaan dengan merebaknya pandemi covid-19, pertumbuhannya relatif masih sama. Perbedaan mencolok terjadi di tren triwulan 3. Pertumbuhan PKP nasional terus melaju positif, sementara laju pertumbuhan Gorontalo cenderung menurun. Kalau dilihat lebih dalam, kontribusi PKP terhadap penciptaan pertumbuhan ekonomi juga sangat kontras. Di triwulan 3 tahun 2020, PKP nasional berkontribusi positif terhadap penciptaan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya di Gorontalo PKP menjadi sumber penciptaan ekonomi yang negatif, yaitu sebesar -3,03 (yoy).

Idealnya, PKP menjadi instrumen pemerintah untuk membantu memulihkan perekonomian yang sedang menurun. Menurut BPS, PKP merupakan pengeluaran atas barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk konsumsi akhir. Sektor pemerintahan terdiri atas seluruh unit pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa), serta seluruh Lembaga Non Profit yang dikontrol oleh unit pemerintah. Instrument PKP diantaranya adalah anggaran pendapatan dan belanja, baik APBN maupun APBD. Meskipun di dalamnya juga terdapat Belanja Modal yang merupakan PMTB, namun jenis belanja yang lain mempunyai jumlah yang cukup signifikan terhadap PDRB.

Grafik 5.4 PKP Nasional dan PKP Gorontalo



Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo

Belanja pemerintah seharusnya memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi Gorontalo. Dari sisi APBN, realisasi belanja sudah mencapai 73,50 persen. Angka ini berada di atas rata-rata nasional sebesar 73,33 persen. Untuk APBN, dari data yang tersaji, terlihat Belanja Barang (58,31 persen) mempunyai realisasi paling rendah. Artinya perlu usaha yang lebih keras untuk melakukan

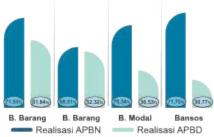
treatment terhadap belanja jenis ini. Sementara untuk jenis belanja lainnya juga tetap harus didorong agar realisasinya maksimal.

Dari sisi APBD, realisasi belanja triwulan 3 tahun 2020 baru mencapai 52,84 persen. Penyerapan masing-masing jenis belanja masih sangat rendah, tertinggi adalah Belanja

Pegawai sebesar 61,84 persen, di mana penyerapannya juga masih harus segera diakselerasi. Untuk jenis belanja yang lain perlu usaha yang sangat keras untuk merealisasikannya. Dari sisa waktu satu triwulan terakhir, pemda mempunyai tugas yang sangat berat untuk menggunakan sisa anggaran dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi Gorontalo.

#### 5.4. Strategi Optimalisasi Belanja Pemerintah

**Grafik 5.5** Perbandingan Presentase Realisasi APBN dan APBD Gorontalo Triwulan III 2020



Sumber: OMSPAN dan LKPDK, diolah

Diperlukan cara-cara extra ordinary untuk akselerasi belanja pemerintah di Gorontalo. Monitoring dan evaluasi (monev) oleh pihak yang berwenang harus ditambah frekuensinya. Hal ini dimaksudkan agar jika terdapat masalah-masalah di level pelaksanaan segera terdeteksi dan dapat segera dicari solusinya. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus lebih proaktif untuk turut serta mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. KPA diharapkan berperan sentral

dalam akselerasi penggunaan anggaran di satkernya masing-masing. Selain itu juga diperlukan dorongan masif oleh para pucuk pimpinan di pemerintahan kepada para pihak terkait untuk segera mengakselerasi penyerapan anggaran dan mengulang-ulang tentang arti penting kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu pemerintah daerah juga perlu memaksimalkan belanja barang ke dalam pos yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan para pelaku usaha di Gorontalo agar *multiplier effect* belanja pemerintah dapat mendorong pemulihan ekonomi di akhir 2020. Beberapa pos yang dapat dimaksimalkan penyerapannya adalah pos belanja jasa pihak ketiga, sewa peralatan kantor, dan pemeliharaan bangunan/gedung kantor. Dengan sinergi antar berbagai pemangku kepentingan, diharapkan anggaran pemerintah dapat terakselerasi dengan secepat-cepatnya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pertumbuhan ekonomi Gorontalo.





